ANALISIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA LUBUKLINGGAU PRESPEKTIF KRIMINOLOGI

Agustinus Samosir

Universitas Bina Insan Lubuklinggau

E-mail: samosiragustinusmh@gmail.com

Masuk : Februari 2021	Penerimaan : Juni 2021	Publikasi : Juli 2021
-----------------------	------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa saat ini. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Sebagai negara hukum, kaitanya adalah bagaimana menegakan supremasi hukum memberantas peredaran dan penggunaan narkotika di Lubuklinggau.

Kata Kunci : Kejahatan; Kriminologi; Narkotika; Peredaran.

ABSTRACT

Narcotics crime is a very serious human crime, has an extraordinary impact, especially on the young generation of a nation today. Narcotics crime is a transnational crime, because the spread and illicit trafficking are carried out across national borders. As a state of law, the link is how to uphold the rule of law to eradicate the distribution and use of narcotics in Lubuklinggau.

Keywords : Crime; Criminology; Narcotics; Circulation.

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya telah di kenal dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia, Narkoba yang semula berguna untuk kesehatan sekarang perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan kemampuan urat saraf produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan harkat dan derajat hidup manusia dimana akal sehat tidak bekerja dengan baik. Peredaran secara ilegal yang sangat masif yang dilakukan oleh bandar terhadap seluruh jenis narkotika, pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab untuk mengatasi peredaran narkoba yang sangat membahayakan kehidupan bangsa, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.

Tiongkok, bahan sejenis GIL ini di kenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar 1840-an. Karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang

candu (*The Opium War*). 1839-184, yang dimenangkan oleh Inggris, setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu (Abdul Jabar Rahim, 2019).

Pada masa penjajahan Belanda, pemakaiannya obat candu sudah dilakukan larangan melalui perundang-undangan, yang pemakaiannya dilakukan oleh kalangan menengah dan warga golongan Cina.

Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah yang besar-besaran kepada China, selanjutnya Amerika. Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah besar kepada China, oleh maskapai Inggris, *Britist East India Company (BEIC)*, dan Belanda, hingga berakhir dengan peristiwa perang candu tahun 1839-1942, yang berakhir dengan kekalahan Cina, dan berakibat dibukanya pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk candu hingga ke Sumatra dan Jawa melalui kongsi dagang VOC (Abdul Jabar Rahim, 2019).

Industri narkotik sebenarnya adalah sebuah kosekuensi dari rentetan panjang revolusi politik yang berlangsung selama abad ke-19. Revolusi industri bukan merupakan berbagai perkembangan yang saling berkaitan, yang berpuncak pada transformasi dunia barat. Pabrik berkembang pesat berkat kemajuan teknologi, birokrasi ekonomi besar, yang muncul untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh industri dan sistem ekonomi kapitalis. Harapan utama dari kapitalis adalah sebuah pasar bebas, tempat memperjualkan berbagai produk industri, sehingga dalam sistem ekonomi kapitalis inilah seseorang akan mendapatkan keuntungan sangat besar, sementara sebagian besar lainnya yang bekerja membanting tulang dalam jam kerja yang panjang menerima upah yang rendah.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan psikotropika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berprestasi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan.

Alasan ekonomis penggunaan narkotik, karena sifat narkotik yang memabukan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi

memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah di kontaminasi. Kejahatan narkoba, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara Hukum (Abdul Jabar Rahim, 2019).

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara, hukum mempunyai ciri-ciri; jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau pradilan yang merdeka, legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Kriteria bagi suatu negara yang modern adalah negara yang menerima dan menerapkan inovasi-inovasi baru demi kehidupan yang terus menerus lebih baik bagi rakyat. Kekuasaan pemerintah dalam negara modern yang berdasarkan hukum artinya dalam negara hukum pemerintah yang di bentuk secara demokratis hanya menyelenggarakan kekuasaan politiknya, terbatas pada kerangka mandat konstitusi.

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Hukum lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat. Serta berperan di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Hukum mengejawantah dalam pergaulan itu, dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga di namakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Narkotik dan Psikotropika sebagai masalah pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia internasional, jelas memerlukan keperangkatan-keperangkatan hukum dalam

bentuk undang-undang tertulis. Hukum narkotik merupakan hukum yang dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotik dari masa ke masa.

Secara substansi bahwa penggunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan konsep dari pada hukum kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang menganggap penggunaan narkotik dan psikotropika di tempatkan atau pada sasaran terhadap ilmu kesehatan dalam bidang kedokteran, namun dengan ketidakwaspadaan terhadap penyalahgunaan maka pemerintah dalam hal ini memberikan suatu batasan hukum terhadap penggunaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan adanya Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, maka sebagai hukum yang mengatur tentang tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu yang di rencanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang tidak yuridis, karenanya faktor diluar hukumlah yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu. Penegakan hukum kejahatan narkotika dan psikotropika, dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang mungkin terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya. Jumlah narkotika dan psikotropika, semakin banyak, dan para pemakainya juga terus bertambah. Tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak bahagia, tetapi juga telah menjalar pada masyarakat ekonomi menengah dan kalangan yang berbahagia. Masuk jalur narkotika dan psikotropika di kenal melalui segi tiga emas (golden triangle), yang terletak antara thailand, Myanmar, dan Laos. Di Indonesia, peredaran narkotik dilakukan dengan berbagai cara, dan cara-cara tersebut sudah mendekati cara mafia internasional.

Walaupun pencegahan narkotika dan psikotropik berdasarkan perundang-undangan sudah sangat ketat dengan penggunaan penyadapan, pembelian terselubung, dan pengawasan terhadap penyerahan barang yang memungkinkan kemudahan proses pembuktian, tetapi masih saja terbuka jalan peredaran gelap

dan pemakaiannya yang justru berkembang di hampir lembaga institusi hingga para penegak hukum di berbagai tingkatannya.

B. METODE

Penelitian ini berpijak pada pendekatan kualitatif, adalah penelitian yang mengandalkan pemerolehan datanya berdasarkan *fieldnotes*, *interviews*, *conversations*, *photographs*, *recordings*, dan catatan peneliti. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (Ali, 2011). Penelitian ini menggunakan metode *analisis yuridis kualitatif*, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri dari: 1) Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya; 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tiga (tiga) bahan, antara lain yaitu: a) Bahan Hukum Primer, b) Bahan Hukum Sekunder, dan c) Bahan Hukum Tersier.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Susanto, 2011). Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand (1897), ahli antropologi Perancis. Sebelumnya kriminologi menggunakan istilah antropologi kriminal (Abdussalam, 2007).

Pengertian menurut para ahli (Mustafa, 2007) :

1. W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland: Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
3. Wood: Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat

dan penjahat dan,termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

4. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
5. Walter Reckless: Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.

Ralf Dahrendof juga mengembangkan teori konflik berdasarkan perspektif, bahwa:

1. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang di tandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsu-unsurnya
2. Teori konflik melihat bahwa setiap element memberikan sumbangan terhadap disetegrasi sosial.
3. Teori konflik juga menilai ketentuan yang terdapat didalam masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya tindakan pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Teori konflik juga menilai ketentuan yang terdapat didalam masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya tindakan pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (Wikipedia, n.d.).

Untuk lebih melengkapi teori-teori tentang sebab musabab kejahatan akan dipaparkan teori lain tentang hal tersebut. Teori yang dimaksud adalah teori penyimpangan budaya “cultural deviance Theories “ dalam teori ini terdiri atas tiga teori utama yaitu:

1. *Social disorganozation;*
2. *Diffential asscaition;*
3. *Culture conflict.*

Social disorganozation theory memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang di sebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

Dari teori di atas menyatakan bahwa penjahat dan delinquent pada kenyataanya menyesuaikan diri bukan pada nilai konvensional melainkan pada

norma-norma yang menyimpang dari nilai kelompok dominan dalam masyarakat (Wikipedia, n.d.).

Tindak Pidana (delik) berasal dari istilah Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*”, dimana *Strafbaarfeit* tersebut dapat terjemahkan dalam beberapa istilah di antaranya: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat di hukum, pelanggaran pidana, dan *delict*. Istilah-istilah di atas dapat diarik kesimpulan, bahwa pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah istilah “delik” yang berasal bahasa latin “*delictum*” dan “*delicta*” (Hamzah, 1994).

Van Hamel merumuskan delik sebagai berikut: “delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana yang dilakukan oleh kesalahan.

Seorang pakar hukum P.A.F Lamintang, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai tindak pidana, beliau merumuskan sebagai berikut : Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat pertanggungjawabkan atas tindakannya sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum (Lamintang, 1984).

Kejahatan narkoba seperti bom waktu karena perkembangannya dari waktu ke waktu semakin menunjukan pemakiannya yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan dan membahayakan seluruh kalangan umat manusia, tetapi juga industri yang dijalankan secara gelap terhadap narkoba justru yang terbesar didunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa yang bisa menghancurkan segala sendi kehidupan seluruh bangsa, juga mempunyai dimensi kejahatan yang lebih besar yang dapat ditimbulkan di Indonesia.

Berdampak pada perekonomian nasional, pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan dapat berakibat fatal terhadap kerusakan akhlak dan moral putra dan putri penerus bangsa yang timbulkan oleh bahaya narkoba saat ini yang harus kita sama-sama lawan peredaran di Indonesia. Dalam sejarahnya, perang terhadap narkoba dapat mengakibatkan hubungan antar negara menjadi terganggu. Karenanya, kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistematis dan perhatian khusus setiap negara untuk memutus mata rantai kejahatan narkoba di suatu negara. Terlebih Pemerintah Kota Lubuklinggau bekerjasama

jajaran yang ada di BNN Kota Lubuklinggau menunjuk sebanyak 5.500 orang sebagai penggiat anti narkoba yang disebar di 72 kelurahan dan mengangkat konsuler di delapan kecamatan untuk mengajak pecandu narkoba untuk sadar mengikuti rehabilitasi untuk menekan jumlah pecandu narkoba di Kota Lubuklinggau. Plt Kepala BNN Kota Lubuklinggau memberikan data mengenai pencapaian dalam penanganan peredaran Narkoba di Kota Lubuklinggau

Data penyalahgunaan narkoba menurut usia di Kota Lubuklinggau

Ketika yang melakukan dan menjadi korban anak-anak yang masih remaja dalam tahap proses pertumbuhan dan Dewasa yang produktif, maka dampak sosial yang sangat besar yang akan timbulkan dari kejahatan narkoba yaitu kehancuran masa depan, fisik maupun mental yang teramat panjang untuk memulihkan mereka dari bahaya narkoba. Namun, kompleksitas dalam penanggulangannya menimbulkan masalah yang sangat rumit.

Berdasarkan Jenis Narkoba yang digunakan yang ada di Kota Lubuklinggau

Berdasarkan Jenis Narkoba yang digunakan yang ada di Kota Lubuklinggau yaitu didominasi oleh ganja dan sabu. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, sebagai hukum yang mengatur tentang tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu yang direncanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yuridis, karenanya faktor diluar hukumlah yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu.

Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, sebagai hukum yang mengatur tentang tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu yang direncanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yuridis, karenanya faktor diluar hukumlah yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu (Mardani, 2008).

Penegakan kejahatan Narkotika, dilakukan dengan sangat gencar, tegas tanpa pandang bulu dalam penegakannya, untuk memutus mata rantai peredaran narkotika karena organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga, membutuhkan cara yang sangat sulit untuk dilakukan memutus mata rantai pemberantasannya (Soetomo, 1995).

Jumlah Narkotika yang beredar semakin banyak, dan para pemakainya juga terus bertambah, semua lapisan masyarakat semua kena tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak bahagia, tetapi juga telah menjalar pada masyarakat ekonomi menengah dan kalangan yang berbahagia semua terkena akan bahayanya peredaran narkotika saat ini. Masuknya jalur Narkotika dikenal melalui segi tiga emas (*goldentriangle*), yang terletak antara Thailand, Myanmar, Laos. Di Indonesia peredaran narkotika semua cara dilakukan guna mengedarkan narkotika, dan cara-cara tersebut sudah mendekati cara mafia internasional (Makaro, 2005).

D. PENUTUP

Pencegahan terhadap peredaran Narkoba yang terjadi saat ini terlebih di Kota Lubuklinggau, sarana prasarana perlu di tingkatkan lagi dengan kualitas pendeteksi yang lebih canggih. Penyuluhan dan pencegahan selalu diberikan seperti di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus-kampus tersebut, pengawasan dari pihak kepolisian. Sistem penegakannya memberikan hukuman yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabar Rahim, A. S. (2019). Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari. *KERTHA WICAKSANA*, 13(1), 6. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/917>
- Abdussalam, H. . (2007). *Kriminologi*. Restu Agung.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (3rd ed.). Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Lamintang. (1984). *Delik-delik Khusus*. Tarsito.
- Makaro, M. T. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Galia Indonesia.
- Mardani. (2008). *enyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT Raja Grafindo.
- Mustafa, M. (2007). *Kriminologi*. FISIP UI PRESS.
- Soetomo. (1995). *Masalah Sosial*. Pustaka Jaya.
- Susanto, I. S. (2011). *Kriminologi*. GentaPublishing.
- Wikipedia. (n.d.). *Teori Konflik*. https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik